

**PEMBENTUKAN SIKAP DAN PERILAKU DEMOKRASI
SISWA MELALUI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

(Studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Padang)

Disertasi



**Helmi Hasan
NIM : 62545**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Doktor Pendidikan**

PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2011

ABSTRACT

HELMI HASAN, 2011, Development of Student Attitudes and Behavior Democracy Through Citizenship Education Learning (Studies in High School in Padang, Dissertation, Doctoral Graduate Program of the State University of Padang).

This study based on from the problem of learning implementation of civic education that more concentrated on cognitive aspect, while the aspects of attitudes and behavior have been neglected. In terms of Civic Education in the era of reforms aimed to form good, intelligent, responsible, and participative citizens in order to develop democratic citizens a democratic society.

The objective of this study is to describe and analyze the implementation of learning at Civic Education in High schools in order to find the modle of Civic Education learning that appropriate for the formation of democratic at Padang city attitudes and behaviors of students. Informannya adalah pengawas sekolah, pengurus MGMP, guru-guru PKn, Kepala sekolah dan wakil siswa.

This study uses quantitative and qualitative approaches. Informans is consisted of at the school superintendent, board MGMP, Civics' teachers, Principal and Vice-Student. As for the quantitative approach, the Civics' teacher population at Padang city and the sample is taken though proportional stratified random sampling. The data in this study have been collected though questionnaires, interviews, observation, and documentary studies.

The finding of the study indicated that the formation of democratic attitudes and behavior through learning Civic Education at Senior High School in Padang City has not been well implemented. Learning is drawn more to the real of knowledge (cognitive), whereas the affective sofar, the and behavioral aspects of democracy was neglected. This can be seen from various aspects such as approaches, methods, learning techniques use by teachers and learning atmosphere.

Learning approach generally used by teachers are expository, with deductive thinking, while learning methods tend to lecturing, askeding questions and gives assignments. Innovative learning as proposed by constructivist, behavioristic, and humanistic with contextual teaching and learning, cooperative learning and discovery that leads to the theories formation of democratic attitudes and behavior have not been properly realized. The cause of the problem that the teachers are not trained to use and had low commitment. Judging from the materials that is encapsulated in the curriculum, it seemed that they are basically is in conformed to implement them with the standard of competence and basic competences.

Based on the real condition of the implementation of the Civics' learning, it is arranged a systematic hypothetical model for the establishment of democratic attitudes and behavior in Civics' learning that can be used by civics teachers. This model has been discussed in a focus group discussions.

ABSTRAK

HELMI HASAN, 2011, Pembentukan Sikap dan Perilaku Demokrasi Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi di Sekolah Menengah Atas Kota Padang, Disertasi, Program Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini berawal dari masalah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih mengutamakan aspek kognitif, sementara aspek sikap dan perilaku terabaikan. Pada hal Pendidikan Kewarganegaraan di era Reformasi bertujuan membentuk warganegara yang baik, cerdas, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam rangka mengembangkan warganegara yang demokratis menuju masyarakat demokratis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Kota Padang dan menemukan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang tepat untuk pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasinya guru-guru PKn kota Padang dan sampel diambil dengan *proportional stratified random sampling*. Informannya adalah pengawas sekolah, pengurus MGMP, guru-guru PKn, Kepala sekolah dan wakil siswa. Data penelitian diperoleh dengan angket, wawancara, observasi, dan studi dokumenter.

Dari hasil analisis ditemukan bahwa pembentukan sikap dan perilaku demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Kota Padang belum terlaksana dengan baik. Pembelajaran yang berlangsung selama ini lebih banyak tertuju kepada ranah pengetahuan (kognitif), sedangkan ranah afektif dan perilaku demokrasi terabaikan. Hal ini terlihat dari berbagai aspek seperti pendekatan, metode, teknik pembelajaran yang digunakan guru, serta suasana pembelajaran.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan umumnya ekspositori, dengan pola pikir deduktif, sedangkan metode pembelajarannya cenderung ceramah, tanya jawab dan penugasan. Pembelajaran yang inovatif menurut teori konstruktivistik, behavioristik, dan humanistik dengan *contextual teaching and learning*, *cooperative learning*, dan *discovery* yang mengarah kepada pembentukan sikap dan perilaku demokrasi belum terealisasi dengan baik. Penyebabnya diantaranya adalah karena belum terlatihnya guru menggunakan model pembelajaran yang inovatif tersebut dan rendahnya komitmen. Dilihat dari materi pembelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum, pada dasarnya sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Berdasarkan kondisi riil pelaksanaan pembelajaran PKn tersebut disusun model hipotetik sistematis pembentukan sikap dan perilaku demokrasi dalam pembelajaran PKn yang dapat digunakan oleh guru-guru PKn. Model ini telah didiskusikan dalam kelompok diskusi terfokus.

PERSETUJUAN AKHIR DISERTASI

Nama Mahasiswa : Helmi Hasan
NIM : 62545

N a m a	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. (<i>Promotor I</i>)	_____	_____
Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd. (<i>Promotor II</i>)	_____	_____
Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A. (<i>Promotor III</i>)	_____	_____

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang,

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Mukhaiyar
NIP. 19500612. 197603.1.005

Prof. Dr. Mukhaiyar
NIP.19500612. 197603.1.005

PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR/PENGUJI

Mahasiswa

Nama : **Helmi Hasan**
NIM : 62545
Tanggal Ujian : 21 Februari 2011

Komisi Promotor/ Penguji

1.	Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. <i>Ketua Promotor/ Penguji</i>	
2.	Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd. <i>Promotor/ Penguji</i>	
3.	Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A. <i>Promotor/ Penguji</i>	
4.	Prof. Dr. Julius Jama, M.Ed. <i>Pembahas/ Penguji</i>	
5.	Prof. Dr. Gusril, M.Pd. <i>Pembahas/ Penguji</i>	
6.	Prof. Dr. Damsar, M.A. <i>Penguji dari Luar UNP</i>	

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi dengan judul **“Pembentukan Sikap dan Perilaku Demokrasi Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Padang)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 19 September 2011
Saya yang Menyatakan,

Helmi Hasan
NIM. 62545

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“Pembentukan Sikap dan Perilaku Demokrasi Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Padang)”**. Disertasi ini merupakan tugas akhir pada program Doktor Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang. Disertasi ini dapat diselesaikan atas bimbingan dan batuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan mendoakan sambil bersyukur semoga apa yang telah disumbangkan untuk terwujudnya tulisan ini menjadi amal soleh disisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Khusus untuk Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., Prof. Dr. Jamaris Jamna, M.Pd. dan Prof.Dr. Azwar Ananda, M.A. masing-masing sebagai promotor utama, kedua dan ketiga disertasi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan serta perhatiannya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan mendoakan semoga apa yang telah diberikan itu menjadi amal soleh disisi Allah swt. Untuk Prof. Drs. Agustiar Syah Nur, M.A., Ph.D. yang telah dipanggil oleh Allah swt. pada saat memberikan bimbingan, penulis mendoakan semoga almarhum ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya disisi Allah swt. dan jasanya menjadi amal soleh baginya. Amin.

Prof. Dr. Jalius Jama, M.Ed, Prof. Dr. Gusril, M.Pd. Prof. Dr.Damsar, M.A. sebagai pembahas disertasi ini yang juga memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaannya diucapkan banyak terima kasih. Demikian pula kepada Prof. Dr. Prayitno, M.Sc.,Ed. yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan Program Doktor dan

Prof. Dr. Mukhaiyar sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang yang selalu memberikan dorongan dan semangat diucapkan terima kasih banyak. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Prof. Dr. Gusril, M.Pd. dan Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd. selaku Asisten Direktur dan segenap staf administrasi Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.

Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd., Rektor serta Pembantu Rektor yang memberikan bantuan moril dan materil, diucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Drs. Syafnil Effendi, SH, M.Hum, Dekan FIS, Pimpinan Jurusan ISP, teman-teman di Jurusan ISP dan Program Pasca Sarjana yang telah memberikan dorongan moril dan materil. Pengawas sekolah diantaranya Drs. Fardinad, M.M., Drs. Dahlius selaku Ketua MGMP Kota Padang dan segenap guru-guru PKn kota Padang yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih, tanpa bantuan yang diberikan tak mungkin penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Untuk itu semua penulis mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga menjadi amal soleh disisi Allah, Swt. Akhirnya, untuk ibu, ayah, isteri dan anak-anak yang tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan dan dorongan yang telah diberikan demi suksesnya pendidikan yang saat ini telah sampai kepada keberhasilannya.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Padang Sumatera Barat.

Padang, Agustus 2011

Penulis,

Helmi Hasan

DAFTAR ISI

ABSTRAK BAHASA INGGRIS	i
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ii
PERSETUJUAN AKHIR	iii
PERSETUJUAN KOMISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 12
A. Filsafat Behaviorisme.....	12
B. Pengetahuan, Sikap dan Prilaku Demokrasi	14
C. Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Pengetahuan, Sikap dan Prilaku Demokrasi	29
D. Pendidikan Kewarganegaraan.....	36
1. Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	40
2. Strategi dan Media Pembelajaran	49
E. Peranan Media Massa dan Tokoh Masyarakat (Public Figure)...	59
F. Studi Terdahulu	61
G. Kerangka Konseptual	67
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.	 73
A. Jenis Penelitian	73
B. Lokasi dan Setting Penelitian.	79
C. Informan, Populasi dan Sampel Penelitian	80
D. Variabel Penelitian	86
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data	87
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	90
G. Teknik Analisis Data	91
 BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 96
A. Temuan Penelitian.....	96
1. Gambaran SMA di Kota Padang	96
2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	101
a. Perencanaan Pembelajaran	102
b. Materi Pembelajaran PKn	106

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	118
3. Fasilitas pembelajaran di sekolah yang mendukung pembentuk-	
kan sikap dan perilaku demokrasi	129
a. Fasilitas Pembelajaran	129
b. Sumber dan Media Pembelajaran	131
4. Suasana Lingkungan Sekolah dalam pembentukan sikap dan	
perilaku demokrasi	139
5. Model Pembelajaran PKn dalam Pembentukan Sikap	
dan Perilaku Demokrasi	145
6. Pengembangan Model Pembelajaran Pembentukan Sikap dan	
Perilaku Demokrasi	151
a. Analisis SWOT Proses Pembelajaran	152
b. Pengembangan Model Pembelajaran PKn	157
c. Realisasi Model Pembentukan Sikap dan Perilaku Demokrasi	
dalam Pembelajaran PKn, SMA di Kota Padang.....	190
d. Penyempurnaan Konsep Model Pembelajaran Pembentukan	
Sikap dan Perilaku Demokrasi	194
B. Pembahasan	200
1. Materi Pembelajaran	200
2. Metode dan Teknik Pembelajaran	205
3. Sumber dan Fasilitas Pembelajaran	207
4. Faktor Suasana Lingkungan.....	209
C. Keterbatasan	210
BAB V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	212
A. Simpulan	212
B. Implikasi	213
C. Saran	215
Daftar Rujukan	217
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. <i>National Standards for Civics and Government</i>	41
Tabel 4.1. Klasifikasi SMA di Kota Padang	97
Tabel 4.2. Gambaran Guru PKn Menurut Golongan.	99
Tabel 4.3. Gambaran Guru PKN Menurut Masa Kerja	100
Tabel 4.4. Gambaran Guru PKN Kota Padang Menurut Umur	101
Tabel 4.5. Komponen yang Terlibat Dalam Penyusunan Program Sekolah	105
Tabel 4.6. Materi yang Perlu Ditambahkan Terkait Dengan Perilaku Demokrasi	117
Tabel 4.7. Metode Dan Teknik Pembelajaran yang Digunakan Guru PKN .	121
Tabel 4.8. Alasan Pemilihan Metode dan Teknik Pembelajaran	123
Tabel 4.9. Penyebab Kurang Aktifnya Siswa Dalam Kelas	125
Tabel 4.10. Bentuk Partisipasi Siswa Dalam Pembelajaran	125
Tabel 4.11. Presentase Siswa yang Aktif Bertanya, mengemukakan Pendapat	127
Tabel 4.12. Media yang Digunakan Dalam Pembelajaran	132
Tabel 4.13. Pelaksanaan Pemilihan Pengurusan Osis	135
Tabel 4.14. Pelaksanaan Disiplin Disekolah	144
Tabel 4.15. Nilai- Nilai yang Dimiliki Siswa Tentang Prinsip Demokrasi ..	145
Tabel 4.16. Kondisi Awal Model Pembelajaran Pembentukan Sikap	150
Tabel 4.17. Ringkasan Analisis SWOT	158
Tabel 4.18. Contoh Sikap dan Perilaku Demokrasi	174
Tabel 4.19. Diagram Kegiatan Pembelajaran	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.Strategi Pembelajaran Yang berpolakan VCT	58
Gambar 2.2. Lingkungan Kehidupan Peserta Didik	68
Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian	70
Gambar 2.4. Posisi Masalah Penelitian Dalam Keilmuan Pendidikan	72
Gambar 2.5. Tahap Penelitian	77
Gambar 2.6. Proses Analisa Data	93
Gambar 4.1. Pembentukan Sikap dan Perilaku Demokrasi.	146
Gambar 4.2. Model Pembelajaran PKn SMA Kota Padang	146
Gambar 4.3. Model Hipotetik Sistematis Pembentukan Sikap dan Perilaku Demokrasi	164
Gambar 4.4. Proses Penemuan Bahan Melalui Analisis Kebutuhan	166
Gambar 4.5. Pengembangan Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran	170
Gambar 4.6. Model Hipotetik Sistematis Pembentukan Sikap Dan Perilaku Demokrasi Setelah Dimodifikasi melalui FGD	199

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin Penelitian	221
Lampiran 2. Daftar Responden Penelitian	222
Lampiran 3. Daftar Informan	223
Lampiran 3.a. Daftar Peserta Diskusi Fokus....	225
Lampiran 4. Angket Penelitian.....	226
Lampiran 5. Instrumen wawancara dengan guru.....	236
Lampiran 6. Interview Guide untuk Pengawas.....	245
Lampiran 7. Interview Guide untuk Siswa.....	251
Lampiran 8. Tabulasi Data Hasil Penelitian.....	256
Lampiran 9. Data Interview dengan Pengawas 1.....	268
Lampiran 10. Data Interview dengan Pengawas 2.....	270
Lampiran 11. Data Interview dengan Pengawas 3.....	272
Lampiran 12. Data Interview dengan Guru.....	274
Lampiran 13. Data Interview dengan Guru.....	278
Lampiran 14. Data Interview dengan Guru.....	282
Lampiran 15. Data Interview dengan Guru.	286
Lampiran 16. Data Interview dengan Guru.	290
Lampiran 17. Data Interview dengan Guru.....	294
Lampiran 18. Data Interview dengan Guru.	298
Lampiran 19. Data Interview dengan Guru.....	302
Lampiran 20. Gambaran Guru PKn SMA Kota Padang...	306
Lampiran 21. Daftar Nama Guru PKn Kota Padang.....	307

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah, pendidikan kewarganegaraan yang dikenal dewasa ini di Indonesia selalu mengalami perubahan, baik perubahan nama maupun materi yang diberikan kepada siswa. Perubahan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh situasi politik kenegaraan pada waktu itu. Namun demikian guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam proses pembelajaran di sekolah selalu mengajarkan kepada siswa bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Hal itu terlihat dalam setiap kurikulum yang diberlakukan, seperti kurikulum 1957, 1968, 1975, 1994, sampai dengan kurikulum KBK dan KTSP sekarang ini.

Realisasinya dalam praktek kehidupan bernegara paham demokrasi tersebut belum dapat terlaksana sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kenyataan yang terlihat diantaranya adalah dilaksanakannya demokrasi liberal sampai dengan tahun 1959. Dampak demokrasi liberal ini adalah munculnya konflik dalam kehidupan politik yang nyaris membawa bangsa dan negara Indonesia kepada perpecahan, diantaranya gagalnya Konstituante dalam melaksanakan tugasnya dan konflik tersebut bermuara pada munculnya pergolakan politik yang melahirkan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta. Kemudian direalisasikan lagi demokrasi terpimpin (1959-1965) yang berdampak pada terkekangnya prinsip-prinsip demokrasi.

Dimasa pemerintahan Orde Baru (ORBA) 1966-1998, pada mulanya sangat demokratis tetapi kemudian terlihat pula pembelengguan yang berujung pada krisis di

berbagai dimensi seperti ekonomi, kepercayaan, dan keadilan. Di bidang pendidikan, kebijakan yang dijalankan adalah depolitisasi pendidikan seperti guru sebagai anggota Korpri tidak boleh berpolitik kecuali memilih Golkar, organisasi ekstra pelajar dilarang, mahasiswa tidak boleh berpolitik praktis, organisasi ekstra mahasiswa dilarang di kampus, dan sebagainya (Zamroni, 1998).

Pada era reformasi terjadi lagi perubahan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum tahun 2004. Khusus untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ditukar namanya dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Perubahan kurikulum ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang sedang berubah. Proses pembangunan karakter bangsa perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi. Proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah kepada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Tugas PKn sebagai yang dikatakan Udin adalah mengembangkan pendidikan demokrasi dengan tiga fungsi pokok yaitu kecerdasan warganegara (*civic intelligence*, membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warganegara (*civic participation*) (Sapriya dan Udin S. Winataputra, 2006:1) Prinsip-prinsip demokrasi tersebut sudah terlihat dalam kurikulum 2004.

Sekarang di Era Reformasi yang ditandai dengan demokratisasi sebagai koreksi atas praktek pemerintahan Orde Baru ditemui beberapa fenomena yang dapat mengaburkan arti demokrasi. Hampir di seluruh daerah Indonesia sebagian kalangan masyarakat termasuk mahasiswa dan siswa dalam menyampaikan keinginannya

berdemonstrasi, dimana "intinya bebas memaksakan kehendak kelompoknya dengan tekanan kekerasan" (Zamroni, 1998). Sampai saat ini sudah lebih dua belas tahun era reformasi berjalan suasana seperti itu masih sering terlihat. Dalam pemilihan kepala daerah misalnya selama periode 2005-2007, sedikitnya sudah berlangsung pemilihan kepala daerah (pilkada) di 323 daerah. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh media massa tercatat pemilihan kepala daerah (pilkada) bermasalah terjadi di 98 daerah (30 % dari daerah yang telah melangsungkan). Dari penelusuran itu pula tercatat terjadi kerusuhan dengan kekerasan di 21 daerah yang melaksanakan pilkada (Kompas, 18 Februari 2008:5). Selama tahun 2010 sudah terjadi konflik di negara Indonesia yang umumnya dilakukan dengan unjuk rasa dan 183 diantaranya berasal dari penyelenggara negara sedangkan lainnya berasal dari rakyat (Metro TV, 10 Februari 2011)

Kondisi memaksakan kehendak yang dibarengi dengan kekerasan itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan masyarakat awam tetapi juga dalam lingkungan lembaga pendidikan. Banyak siswa dan mahasiswa perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia menyampaikan aspirasinya yang diikuti dengan tindakan kekerasan. Kondisi semacam itu kelihatan berlanjut sampai tahun 2010 dimana hampir setiap hari diberitakan di televisi adanya unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi, sehingga terkesan bahwa pelaksanaan demokrasi itu harus dengan unjuk rasa, padahal banyak media lain yang dapat digunakan dalam menyampaikan aspirasi.

Tidak terlaksananya paham demokrasi tersebut disinyalir karena setiap kurikulum yang diberlakukan di sekolah tidak menekankan kepada aspek sikap dan

perilaku berdemokrasi yang diinginkan oleh konstitusi dan budaya masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Praktek penyelenggaraan negara dan tatanan kehidupan masyarakat, menjadi stimulus dalam proses pembelajaran PKn di sekolah-sekolah.

Gambaran peristiwa demi peristiwa yang dikemukakan di atas memberikan indikasi kepada kita bahwa ada suatu ruang yang kosong atau belum terisi yang bertugas menangani bagaimana mengimplimentasikan prinsip-prinsip demokrasi itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara sadar dan terprogram. Wadah yang disepakati dan yang dipandang strategis untuk mengimplimentasikan prinsip-prinsip demokrasi tersebut adalah melalui pendidikan terutama di sekolah,

Hasil penelusuran yang dilakukan baik dari pengamatan langsung ataupun penelitian terdahulu terlihat guru-guru masih menggunakan strategi pembelajaran konvensional dimana aktivitas terpusat pada guru. Kegiatan proses pembelajaran umumnya didominasi oleh guru, berupa transformasi pengetahuan guru kepada siswa. Sedikit sekali waktu yang diberikan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Kebiasaan seperti ini kelihatannya berdampak terhadap motivasi dan kerjasama siswa dalam pembelajaran pada hal partisipasi dan kerjasama merupakan unsur penting dalam demokrasi. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini dilakukan oleh Isnarmi dan kawan-kawan tahun 2008 dengan judul Otoritas Guru dalam Konteks Pendidikan Kritis (Analisis Wacana Kritis Interaksi Belajar Mengajar di SMUN Kota Padang). Hasil penelitian ini diantaranya memperlihatkan bahwa guru-guru masih menggunakan strategi pembelajaran

konvensional dalam pembelajarannya dan siswa terlihat kurang aktif walaupun diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam pembelajaran, waktu dan kegiatan pembelajaran banyak dimonopoli oleh guru dan hanya sedikit sekali kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk ambil bagian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip demokrasi dalam pembelajaran belum terwujud.

Uraian di atas, menunjukkan betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan itu khususnya pendidikan demokrasi bagi warga negara. Masyarakat demokratis tidak akan terbentuk secara alami melainkan diupayakan dengan terencana diantaranya melalui pendidikan. Sehubungan dengan ini Zamroni (1998:5) menyatakan ” guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berfikir kritis dan bertindak demokratis.

Kehidupan yang demokratis semakin dibutuhkan karena kehidupan yang demikian merupakan tuntutan global sebagaimana dirumuskan oleh UNESCO dalam lima tonggak etik global yang harus diwujudkan di era globalisasi diantaranya hak asasi manusia dan tanggung jawabnya serta demokrasi dan unsur-unsurnya (Tilaar, 1999:214). Tuntutan lain di bidang pendidikan terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan Manajemen yang Berbasis Sekolah (MBS) dan mulainya diterapkan Sistem Kredit Semester pada beberapa SMA di Indonesia yang pada hakekatnya menuju kepada demokratisasi. MBS menuntut partisipasi lebih besar dari staf dan para orang tua dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan di sekolah (Ibtisam Abu-Duhou, 2002:17) sementara partisipasi merupakan unsur utama dalam

demokrasi. Selanjutnya dikatakan oleh Ibtisam Abu-Duhou (2002:17-18) bahwa menurut ketentuan dalam MBS keputusan-keputusan dibuat secara kolektif dan kolegial oleh para *stakeholder* yang relevan, bukan oleh kepala sekolah secara individual atau wakilnya. Selain partisipasi unsur demokrasi lainnya yang terlihat dalam MBS adalah kerjasama. Orang tua peserta didik dan guru mengetahui apa yang terbaik bagi siswanya dan melalui usaha kerjasama mereka dapat mengembangkan program-program yang tepat yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan oleh Campbell-Evans tahun 1993 yang menyatakan dalam konteks MBS, terdapat beberapa kesempatan bagi peningkatan profesionalisme staf dan kerjasama staf - orang tua dalam pendidikan siswa (Ibtisam Abu-Duhou,2002: 18). Begitu juga dengan Sistem Kredit Semester (SKS) yang berimplikasi demokrasi. Sistem Kredit Semester memberikan peluang kepada peserta didik (siswa) untuk memilih dan belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dapat mengambil mata pelajaran yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang rendah kemampuannya. Mata pelajaran yang disediakan dapat diikuti oleh siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Cara ini jelas lebih demokratis karena memberikan kebebasan kepada peserta didik serta memperhatikan potensi dirinya.

Sekarang demokrasi sudah menjadi sebuah filosofi dan cara hidup (*a philosophy and way of life*) dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi harus dipelajari, dikembangkan dan dijadikan sikap dan perilaku dalam kehidupan.

Wadah untuk itu adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di tengah masyarakat sampai saat ini belum ada pendidikan kewarganegaraan (*civic education for society*) khususnya pendidikan demokrasi yang terprogram oleh pemerintah, kecuali di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bertumpunya pendidikan demokrasi di sekolah. Secara formal pembentukan sikap dan perilaku demokrasi di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan dimulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan tinggi.

Sekolah merupakan wahana yang paling strategis dalam mengajarkan, mengembangkan, membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku demokrasi. Sebab sekolah merupakan wadah yang aktivitasnya terprogram dan terencana dengan baik, memiliki unsur-unsur: guru, siswa, kepala sekolah, tenaga administrasi yang selalu berinteraksi setiap hari, serta siswa sebagai peserta didik relatif homogen dan potensial untuk dikembangkan. Dari semua jenjang pendidikan tersebut tingkat SLTA lah yang paling strategis dalam pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku demokrasi karena setelah tamat SLTA pada umumnya seseorang akan terlibat dengan beberapa aktivitas demokrasi dalam masyarakat seperti Pemilu. Sehubungan dengan ini UNESCO menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membuat sekolah sebagai suatu model praktek demokrasi yang dapat dipahami anak-anak berdasarkan masalah-masalah praktis (Delors,1999:45). Pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku demokrasi di sekolah akan berjalan dengan baik bila materi pembelajaran, proses pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, serta situasi kondusif untuk demokrasi tersedia dan dimiliki secara baik dan lengkap. Di

samping itu, yang menentukan juga adalah tingkat penerimaan siswa terhadap nilai demokrasi. Sampai dengan saat ini di Sumatera Barat penelitian yang menggambarkan pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku demokrasi di Sekolah Menengah Atas belum ditemukan. Penelitian menjadi penting karena saat ini kebijakan dalam penyusunan kurikulum lebih banyak berada pada satuan pendidikan (sekolah). Hal ini mengandung arti bahwa kurikulum satu satuan pendidikan dapat berbeda dengan satuan pendidikan lainnya.

Semua fenomena di atas baik pada era ORLA, ORBA, ataupun era Reformasi merupakan indikasi tidak berhasilnya pendidikan demokrasi khususnya pembentukan sikap dan perilaku demokrasi yang secara khusus menjadi tanggung jawab mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal inilah yang mendorong penelitian ini difokuskan pada pembentukan sikap dan perilaku demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA.

Upaya pembentukan sikap dan perilaku demokrasi sebenarnya bukanlah gagasan baru dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, karena nilai-nilai demokrasi sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan selalu dibudayakan. Nilai-nilai demokrasi yang sudah tertanam dan membudaya bagi masyarakat itu seharusnya menjadi stimuli dan pendorong pula untuk penyemaian dan tumbuhnya bibit-bibit demokrasi di sekolah tetapi kenyataannya tidak berkontribusi besar bagi pembentukan sikap dan perilaku demokrasi oleh guru-guru PKn.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Pengembangan pengetahuan, pembentukan sikap dan perilaku demokrasi di sekolah melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha terencana untuk terwujudnya sikap dan perilaku demokrasi siswa dan merupakan bekal memasuki perguruan tinggi dan masyarakat. Usaha tersebut menyangkut pelaksanaan tugas guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang didukung oleh faktor lain seperti: suasana sekolah dan manajemen sekolah (kerjasama guru, kepala sekolah, dan tata usaha, serta faktor penunjang lainnya). Bertolak dari latar belakang masalah dan tugas guru PKn serta keterkaitannya dengan faktor-faktor yang menentukan pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku demokrasi tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Padang dengan melihat berbagai aspek pembelajaran seperti: perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; materi pembelajaran, suasana lingkungan kelas dan sekolah, ketersediaan peralatan yang dibutuhkan, serta kerjasama guru dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan?
2. Bagaimanakah model pembelajaran pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa dalam pembelajaran PKn. di SMA Kota Padang ?
3. Bagaimanakah model pembelajaran PKn yang dikembangkan dalam membentuk sikap dan perilaku demokrasi siswa?

Berdasarkan masalah tersebut, fokus penelitian ini adalah: pembentukan perilaku demokrasi siswa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas di Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa di SMA Kota Padang,
2. Menggambarkan model pembelajaran pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa dalam pembelajaran PKn selama ini di SMA Kota Padang.
3. Menemukan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa di SMA kota Padang.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya tentang pendidikan demokrasi serta memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat ilmiah terutama bidang ilmu pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA kota Padang, dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa. Gambaran tersebut sangat berguna bagi

pimpinan sekolah dalam pengelolaan sekolah, terutama penyediaan sarana dan prasarana sekolah.

- b. Sebagai masukan bagi guru dalam memilih model pembelajaran pembentukan sikap dan perilaku demokrasi siswa sehingga upaya yang dilakukan benar-benar mampu membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku demokrasi sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah.
- c. Menjadi masukan yang berarti bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita reformasi yaitu terwujudnya masyarakat yang demokratis.
- d. Sebagai salah satu langkah untuk terealisasinya lima tonggak etik global demokrasi yang dirumuskan oleh UNESCO yaitu hak asasi manusia dan tanggung jawabnya, demokrasi dan unsur-unsur masyarakat madani, proteksi dari golongan minoritas, komitmen bagi pemecahan secara damai berbagai konflik dan negosiasi yang adil, dan kesamaan intergenerasi sebagaimana dikemukakan Tilaar (1999; 213-214)